

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Pres, Yogyakarta, 2009.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi VI, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang, 2005

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatn Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.

-----, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

-----, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris(MKN)*, Refika Aditama, 2017.

I made Puryatma, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Bali NTT, Denpasar, 2010

Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

-----, *Usaha Memahami Hak Asasi Manusia Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Lumban Tobing G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Muhammad hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Surya Indah, Padang, 2012

Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group, Jakarta, 2007.

Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.

Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2011.

Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985

B. Peraturan Undang-Undang

Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3), *Lembaran Negara* Tahun 1954 Nomor 101.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 angka (16).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Lembaran Negara* Nomor 14 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, *Lembaran Negara* Nomor 101 Tahun 1954, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 700.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peradilan Umum, *Lembaran Negara* Nomor 34 Tahun 2004, *Tambahan Lembaran Negara* 3327.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Lembaran Negara* Nomor 117 Tahun 2004, *Tambahan Lembaran Negara* 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Lembaran Negara* Nomor 3 Tahun 2014, *Tambahan Lembaran Negara* 549

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, *Berita Negara Republik Indonesia* Nomor 1787 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, *Berita Negara Republik Indonesia* Nomor 180 Tahun 2016.

C. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali#cite_note-1 yang diakses pada tanggal 10 Januari 2019

Website Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-notaris>, diakses tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.14 WIB.

Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, *Gagasan Negara Hukum*, diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile//Konsep_Negara_Hukum_Indonesia

Dilihat dalam <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 19 Januari 2018 pada pukul 20.00 WIB.

Dilihat dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55dd7cde11b0d/pengujian_uu-jabatan-notaris-kandas, yang diakses pada tanggal 19 Januari 2019

Dilihat dalam <http://Alwelius.Blogspot.co.id>, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 UUJN dan Tindakan Yang Dapat Dilakukan Kedepan*, diakses pada tanggal 20 Januari 2019

D. Jurnal

Herman Faisal Siregar, 2014, Jurnal Ilmiah, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Notaris (Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004)*, Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Juleni, 2018, *Implementasi Pemeriksaan Notares Oleh Majelis Kehormatan Notaris Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016*, Universitas Sebelas Maret.

Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Hlm. 29., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 141., dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta.

Mohammad Anas Nashiruddin, 2014, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Universitas Brawijaya, Malang.

Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang.

